



LAPORAN PENELITIAN

STRATEGI PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH KARENA FAKTOR SOSIAL-EKONOMI KELUARGA DI PROVINSI GORONTALO

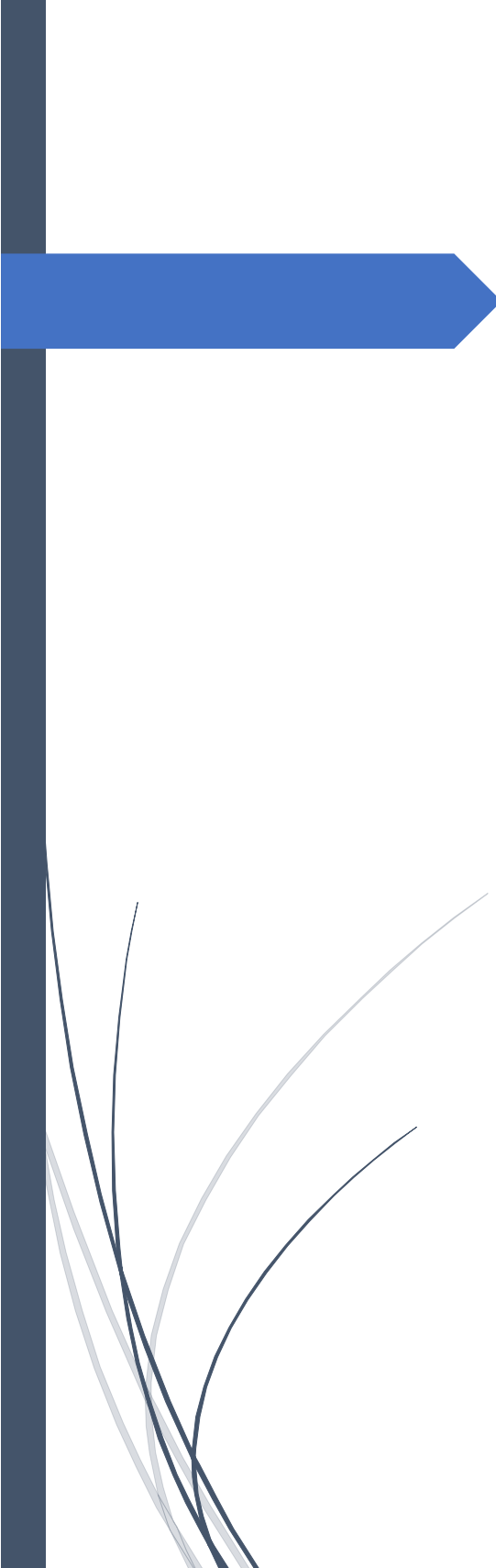


Tim Peneliti:

Dr. Muchtar Ahmad, S.Pd, M.Si, CIT

Dr. Rustam Tohopi, S.Pd, M.Si

Mahyudin Humalanggi, S.E., M.Si



STRATEGI PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH KARENA FAKTOR SOSIAL- EKONOMI KELUARGA DI PROVINSI GORONTALO

Tim Peneliti :

1. Dr. Muchtar Ahmad,S.pd.,M.Si (Ketua)
2. Dr. Rustam Tohopi,S.Pd.,M.Si.
3. Mahyudin Humalangi.,SE.,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah karena Faktor Sosial–Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti mengenai permasalahan pendidikan yang hingga kini masih menjadi tantangan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Gorontalo.

Masalah anak putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan terutama kondisi sosial–ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi empiris, menganalisis akar masalah, serta merumuskan strategi penanggulangan yang tepat dan kontekstual bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kerja sama selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, guru, orang tua, Tokoh masyarakat serta seluruh responden yang telah bersedia memberikan informasi berharga demi kelengkapan data penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada para responden yang sangat kooperatif atas penyampaian informasi maupun saran dan masukan yang sangat berarti.

Peneliti menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan penanggulangan anak putus sekolah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, November 2025

Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

Kafer	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan	v
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Tujuan Penelitian	5
1.3 Manfaat Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5 Kajian Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah Karena Faktor Sosial - Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo	6
1.6 Metode penelitian	8
1.7 Hasil Penelitian	13
1.7.1 Deskripsi hasil Penelitian	13
1.7.2 Mengidentifikasi masalah Inti Strategi Penanggulangan Anak Putus sekolah Karena Faktor Sosial Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo	14
1.7.3 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah Karena Faktor Sosial Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo	22
1.7.4 Memformulasikan Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah Karena Faktor Sosial Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo	25
1.7.5 Merumuskan Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah Karena Faktor Sosial Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo	26
1.8 Temuan Hasil Penelitian	28
1.8.1 Faktor sosial keluarga	29
1.8.2 Faktor Budaya dan Lingkungan	30
1.8.3 Akses layanan Pendidikan	30
1.8.4 Rumusan Strategi Penanggulangan	30
1.8.5 Strategi Intervensi Ekonomi Keluarga	30
1.8.6 Strategi Intervensi Sosial dan ketahanan Keluarga	30
1.8.7 Strategi Penguatan Layanan dan Sistem pendidikan	31
1.9 Rekomendasi	32
1.9.1 Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah Karena Faktor Sosial Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo	32

1.9.2 Penguatan Kebijakan Berbasis Keluarga (<i>Family-Centered Education Policy</i>)	32
1.9.3 Reformasi Bantuan Sosial Pendidikan Lebih Tepat Sasaran	32
1.9.4 Penguatan Sistem Deteksi Dini Anak Beresiko Putus Sekolah	33
1.9.5 Kolaborasi Multipihak Dalam Penanganan Anak putus Sekolah	33
1.9.6 Pengembangan Program Sekolah Ramah Anak dan Inklusif Bagi Keluarga Miskin	34
1.9.7 Perluasan Program Keterampilan dan Pendidikan Non Formal	34
1.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Secara Berkelanjutan dan Berdampak .	34
1.10 Daftar Pustaka	35

RINGKASAN

Provinsi Gorontalo, terbentuk sejak tahun 2000, telah berupaya keras mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai dimensi pembangunan, mulai dari pelayanan dasar hingga infrastruktur, menjadi fokus utama pemerintah daerah. Namun demikian, data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Gorontalo masih tinggi, yakni sebesar 13,87%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo menunjukkan pertumbuhan positif, namun masih berada pada angka 72,01 di bawah IPM nasional yang mencapai 75,02. Hal ini mengindikasikan masih terdapat kantong-kantong permasalahan pembangunan yang memerlukan perencanaan kebijakan yang matang, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah.

Pendidikan memiliki peran krusial sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Ia membentuk keterampilan, meningkatkan kualitas hidup, serta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Namun kenyataannya, angka putus sekolah masih menjadi persoalan serius di Gorontalo, khususnya pada transisi dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke jenjang lebih tinggi. Faktor ekonomi keluarga diduga menjadi penyebab utama, di mana anak-anak terpaksa berhenti sekolah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga akibat beban biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung serta tuntutan ekonomi dasar yang lebih mendesak. Dalam beberapa kasus, anak bahkan didorong menjadi pencari nafkah tambahan.

Dampak anak putus sekolah tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pembangunan sumber daya manusia Gorontalo secara menyeluruh, serta berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi. Kajian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi karakteristik demografi dan sosial ekonomi anak-anak putus sekolah pada jenjang SMP beserta keluarganya. Menganalisis faktor-faktor ekonomi yang paling mempengaruhi keputusan berhenti sekolah. Mengevaluasi efektivitas program-program penanggulangan yang telah diterapkan. Merumuskan strategi yang inovatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Manfaat dari kajian ini mencakup, Identifikasi mendalam atas faktor ekonomi penyebab putus sekolah. Perancangan strategi penanggulangan jangka panjang berbasis bukti. Efisiensi dalam alokasi sumber daya program Pendidikan. Penyediaan data dan analisis empiris untuk mendukung perumusan kebijakan publik yang relevan. Pengembangan model pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ruang lingkup kajian meliputi, Pengumpulan dan analisis data putus sekolah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan survei dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan (anak putus sekolah, keluarga, sekolah, dan dinas terkait). Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Studi literatur tentang praktik baik dan teori kebijakan Pendidikan. Perumusan rekomendasi strategi penanggulangan yang adaptif dan berkelanjutan.

Isu anak putus sekolah pada jenjang SMP karena faktor ekonomi merupakan persoalan krusial yang menghambat kemajuan individu dan memperkuat kemiskinan struktural. Anak-anak yang mengalami putus sekolah umumnya berasal dari keluarga rentan dengan pendapatan tidak tetap, jumlah tanggungan yang besar, dan latar belakang tinggal di daerah pedesaan atau pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Penanggulangan, Anak Putus Sekolah Dan Faktor Sosial-Ekonomi Keluarga.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan menjadi pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, kenyataannya masih banyak anak di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo, yang mengalami putus sekolah, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Salah satu penyebab utama fenomena ini adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu menopang biaya pendidikan secara berkelanjutan.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2000 yang sebelumnya menyatu dengan Provinsi Sulawesi Utara. Lebih dari dua dekade pemerintah Provinsi Gorontalo telah menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensi secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai dari pemenuhan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta program strategis lainnya. Meskipun demikian data BPS pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan Provinsi Gorontalo sekitar 15,15 % yang berarti masih berada di atas rata-rata nasional dan masih menjadi provinsi termiskin ke-5 di Indonesia. Disamping itu data indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013-2022 terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 0,85 % per tahun, namun secara level IPM Gorontalo masih di bawah capaian IPM Nasional. IPM nasional Tahun 2023 sebesar 74,39, sedangkan IPM Gorontalo sebesar 71,25 dengan kategori IPM tinggi.

Provinsi Gorontalo, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di kawasan timur Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Data dari Dinas Pendidikan dan instansi terkait menunjukkan adanya tren anak-anak usia sekolah menengah pertama yang tidak melanjutkan pendidikan karena terpaksa membantu ekonomi keluarga atau karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah seperti seragam, transportasi, dan biaya penunjang lainnya, meskipun pendidikan dasar telah digratiskan secara formal.

Faktor ekonomi ini sering kali berkelindan dengan masalah sosial lain seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan pentingnya

pendidikan, serta minimnya akses terhadap bantuan sosial atau program beasiswa. Jika tidak ditangani secara strategis dan komprehensif, anak-anak yang putus sekolah berpotensi mengalami keterbatasan dalam pengembangan kapasitas diri, keterampilan, dan peluang kerja di masa depan, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi. Pemerintah daerah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program untuk mencegah dan menangani kasus anak putus sekolah, seperti pemberian bantuan pendidikan, program keluarga harapan (PKH), dan penyuluhan kepada masyarakat. Namun, efektivitas strategi-strategi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka putus sekolah secara signifikan, khususnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Pentingnya pendidikan bukan suatu hal yang diragukan lagi di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Melalui pendidikan orang-orang lebih dapat mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Mutu pendidikan akan mempengaruhi bagus atau tidaknya hasil yang diperoleh dari suatu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan bermutu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dimaksudkan sebagai acuan dasar oleh setiap pengelola, penyelenggara dan satuan pendidikan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mencanangkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai salah satu Program Unggulan Provinsi Gorontalo. Dipahami bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu yang mempengaruhi pembangunan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang baik tidak akan bisa lepas dari suatu proses pendidikan, baik itu pendidikan formal atau informal. Pada hakekatnya pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang dengan pendidikan yang memadai seseorang akan mampu menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan ini pula harkat dan martabat seseorang akan terangkat, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, akan semakin tinggi pula martabat orang

tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada bangsa dan negara. Harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia juga dipengaruhi oleh pendidikan penduduknya.

Sejalan dengan arti pendidikan pada Undang-undang sisdiknas no 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah sarana untuk membentuk keterampilan yang diperlukan dirinya, Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan tujuannya pada Bab II pasal 3 menjelaskan tentang fungsi pendidikan "Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, (UU No.20/2003 Sistem Pendidikan Nasional).

Tahun 2019 Kadek Ranti Dkk, menguraikan upaya pencegahan anak putus sekolah menengah pertama di Gerokgak menunjukkan bahwa (1) Penyebab anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua, kemampuan siswa rendah dan hamil diluar nikah, (2) Implikasi anak putus sekolah meliputi implikasi kepada anak itu sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat, (3) Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi sosialisasi, pemberian beasiswa, kunjungan kerumah siswa dan kontrol ijin sekolah. Riset ini dilakukan secara kualitatif.

Akan tetapi pada realitanya sampai dengan saat ini angka putus sekolah masih banyak di temukan di berbagai daerah-daerah termasuk di Gorontalo angka putus sekolah merupakan masalah yang pelik dan bisa terjadi pada siapa saja, tidak memandang sosial, kultur, dan budaya orang tersebut, baik orang kaya ataupun miskin dan selain itu masing-masing mempunyai alasan tersendiri, lain halnya dengan pengertian putus sekolah menurut Ary H. Gunawan mengatakan bahwa putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya (Ary H. Gunawan 2010: 71).

Berikut ini dapat di lihat sebaran data prosentase penduduk kategori berpendapatan ekonomi rendah (Miskin) pada tahun 2024 di tingkat Provins Gorontalo.

Tabel: Prosentase Kemiskinan

Wilayah	Kemiskinan	
	Jumlah (ribu jiwa)	Persentase
Boalemo	31,53	17,83
Gorontalo	61,91	16,43
Pohuwato	28,93	17,11
Bone Bolango	23,67	14,8
Gorontalo Utara	18,99	16,86
Kota Gorontalo	12,97	5,74
Provinsi Gorontalo (Maret)	177,99	14,57
Provinsi Gorontalo (Sept)	170,03	13,87

Sumber data: Bappeda Gorontalo Tahun 2024

Data ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan di tingkat Provinsi Gorontalo dari bulan maret sebesar 14,57% ke bulan September menjadi 13,87% pada tahun 2024. Fenomena ini nampak pada angka partisipasi sekolah (APS) di Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat fenomena anak putus sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Selama pandemi, tercatat 467 siswa SMA/SMK yang putus sekolah di Provinsi Gorontalo (Gopos), Menurut Dinas Dikbudpora Gorontalo (2021), dari 50.116 siswa di jenjang ini; 294 siswa SMA, dengan penyebab: 1) Menikah: 174 orang, 2) Bekerja: 76 orang, 3) Meninggal: 18 orang dan 4) Lain-lain: 26 orang. Sementara SMK 173 siswa SMK, dengan penyebab: 1) Menikah: 97 orang, 2) Bekerja: 69 orang, 3) Meninggal: 5 orang, dan 3) Dikeluarkan: 2 orang. Salah satu faktor dominan yang disinyalir menjadi penyebab utama adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga, mencari nafkah, atau karena tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah. Dampak dari putus sekolah ini sangat signifikan, tidak hanya bagi individu anak yang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tetapi juga bagi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Anak yang putus sekolah rentan terseret dalam lingkaran kemiskinan, berkurangnya keterampilan dan wawasan, serta peluang kerja yang terbatas. Pemerintah provinsi menyambut hal ini dengan dorongan agar intervensi makanan bergizi dan program perlindungan sosial mencakup anak putus sekolah, terutama mereka yang berhenti sejak SMP ke atas. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang paling relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam penanggulangan anak putus sekolah di tingkat SMP akibat faktor ekonomi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini juga akan menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan; 1) mulai dari pemerintah, 2) sekolah, 3) keluarga dan lingkungan masyarakat. Dalam upaya merumuskan pendekatan yang holistik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi daerah.

1.2 Tujuan Penelitian/Kajian

Penelitian atau kajian ini disusun dengan tujuan:

- 1) Mengidentifikasi masalah inti Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah karena faktor sosial-ekonomi keluarga di Provinsi Gorontalo.?
- 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Anak Putus Sekolah dan Strategi Penanggulangannya di Provinsi Gorontalo.?
- 3) Memformulasikan Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Provinsi Gorontalo melalui Program Penanganan Melalui Penanganan Faktor Ekonomi Keluarga.?
- 4) Merumuskan Strategi Kebijakan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Provinsi Gorontalo.?

1.3 Manfaat Penelitian

Melalui kegiatan kajian ini beberapa manfaat yang akan didapat antara lain:

1. Mengidentifikasi secara detail berbagai aspek faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak putus sekolah, seperti rendahnya pendapatan, banyaknya tanggungan, atau dampak bencana ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik, solusi yang dirumuskan akan lebih tepat sasaran.
2. Merancang strategi penanggulangan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Ini bisa meliputi program bantuan ekonomi, beasiswa, pelatihan keterampilan bagi orang tua, atau pemberdayaan ekonomi keluarga.
3. Mengetahui penyebab utama dan wilayah terdampak, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengalokasikan sumber daya (dana, tenaga, program)

secara lebih efisien. Ini menghindari pemborosan dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.

4. Menyediakan data dan bukti empiris yang kuat untuk mendukung perumusan kebijakan publik yang relevan dan efektif. Kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti akan lebih mudah diterima dan di implementasikan.
5. Memberikan wawasan untuk merancang program pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu, misalnya dengan menyediakan fleksibilitas dalam jadwal belajar atau metode pengajaran yang disesuaikan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup kajian ini mencakup beberapa aspek utama:

1. Identifikasi data dan informasi anak putus sekolah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
2. Survei dan wawancara mendalam dengan anak putus sekolah, keluarga, pihak sekolah (guru, kepala sekolah), dinas terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPS), dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Analisis data kuantitatif (statistik pendidikan, data kemiskinan) dan kualitatif (hasil wawancara, Focus Group Discussion).
4. Studi literatur terkait program penanggulangan anak putus sekolah di daerah lain atau tingkat nasional yang berhasil.
5. Perumusan rekomendasi strategi yang mencakup aspek kebijakan, program intervensi, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

1.5 Kajian Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah Karena Faktor Sosial-Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo.

- 1) Isu anak putus sekolah, khususnya di jenjang SMP, SMA/SMK masih menjadi permasalahan krusial yang memerlukan perhatian serius, terlebih ketika akar penyebabnya adalah faktor ekonomi keluarga. Di Provinsi Gorontalo, tantangan ini bukan hanya menghambat individu anak untuk meraih pendidikan yang layak, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia daerah secara keseluruhan dan berpotensi melanggengkan lingkaran kemiskinan

antargenerasi. Memahami dinamika dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat sangatlah esensial.

- 2) Memahami Akar Masalah: Mengapa Ekonomi Keluarga Berdampak?
- 3) Pendidikan adalah hak, namun realitas ekonomi seringkali menjadi penghalang terbesar. Beberapa poin kunci yang menjelaskan mengapa faktor ekonomi keluarga menyebabkan anak putus sekolah di Gorontalo meliputi: Biaya Langsung dan Tidak Langsung: Meskipun sekolah negeri bebas SPP, masih ada banyak biaya lain seperti seragam, buku, alat tulis, biaya transportasi, uang saku, hingga biaya ekstrakurikuler yang memberatkan keluarga miskin. Satu kejadian tak terduga seperti sakit atau musibah dalam keluarga dapat langsung memicu anak untuk berhenti sekolah.
- 4) Prioritas Kebutuhan Dasar: Ketika keluarga dihadapkan pada pilihan antara membeli makanan, obat-obatan, atau membayar biaya sekolah, kebutuhan dasar seringkali menjadi prioritas utama. Pendidikan, meskipun penting, terkadang dianggap sebagai pengeluaran yang bisa ditunda atau diabaikan demi kelangsungan hidup sehari-hari.
- 5) Peran Anak sebagai Pencari Nafkah Tambahan: Dalam banyak kasus, anak-anak dari keluarga miskin terpaksa bekerja di usia muda untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Ini bisa berupa pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, jasa, atau pekerjaan informal lainnya yang menyita waktu belajar mereka.
- 6) Lingkungan yang Kurang Mendukung: Tingkat pendidikan orang tua yang rendah atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan jangka panjang juga dapat berkontribusi. Mereka mungkin melihat "bekerja" sebagai solusi instan daripada investasi jangka panjang melalui pendidikan.
- 7) Profil Anak Putus Sekolah dan Keluarganya di Gorontalo.
- 8) Latar Belakang Keluarga Rentan: Umumnya berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, pekerjaan orang tua yang tidak tetap (buruh harian, petani kecil, nelayan tradisional), jumlah tanggungan keluarga yang banyak, atau orang tua tunggal.
- 9) Motivasi Ganda: Sebagian anak mungkin masih memiliki motivasi untuk sekolah, namun terbentur realitas ekonomi. Sebagian lain mungkin kehilangan motivasi karena tekanan sosial atau rasa malu akibat kondisi ekonomi mereka.

- 10) Lokasi Geografis: Cenderung terkonsentrasi di daerah pedesaan, pesisir, atau pinggiran kota di mana akses pendidikan dan peluang ekonomi formal terbatas.

1.6 Metode Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di wilayah Kabupaten Gorontalo sebagai populasi terbesar di Provinsi Gorontalo. Dengan waktu penelitian selama 3 bulan yaitu sejak September – November 2025. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian selama 3 bulan diuraikan pada Tabel 1 ;

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	KEGIATAN PENELITIAN	AGUS.	SEPT.	OKT.	NOV.
1	FGD tim peneliti dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan penelitian				
2	Pengumpulan data primer (survei, indepth interview)				
3	Pengumpulan data sekunder				
4	Pengolahan data				
5	Analisis dan intepretasi				
6	Penyusunan laporan				

2) Desain dan Tahapan Penelitian

Untuk mengkaji strategi penanggulangan anak putus sekolah karena faktor sosial-ekonomi keluarga di Provinsi Gorontalo, kita dapat menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau fenomenologi. Pendekatan kualitatif memungkinkan kita untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena putus sekolah karena faktor ekonomi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menurut Moleong (2015:6) adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah menggunakan cara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji lebih jauh terkait kebijakan dan implementasi pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dengan melakukan

Wawancara atau Focus Group Diskussion (FGD). Adapun prosedur dalam penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, (2014) memaparkan prosedur analisis data diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Berikut adalah tahapan penelitian;

Tahap 1: Persiapan dan Perencanaan

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian;

- 1) Masalah: Mengapa anak SMP di Gorontalo putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga? Bagaimana strategi penanggulangan yang telah dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini?.
- 2) Tujuan: Mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi dominan, menganalisis dampak putus sekolah, mengevaluasi efektivitas strategi penanggulangan yang ada, dan merumuskan rekomendasi strategi penanggulangan yang lebih efektif.
- 3) Studi Literatur: Mengkaji teori-teori terkait pendidikan, kemiskinan, akses pendidikan, dan intervensi sosial. Mengumpulkan data sekunder tentang kondisi ekonomi Gorontalo, statistik pendidikan, dan program penanggulangan kemiskinan atau putus sekolah.
- 4) Penentuan Lokasi dan Sampel Penelitian: Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang memiliki angka putus sekolah SMP yang signifikan akibat faktor ekonomi (misalnya, identifikasi berdasarkan data Dinas Pendidikan atau BPS).
- 5) Sampel (Informan Kunci) ;
 - a) Anak putus sekolah SMP: Minimal 5-10 anak yang putus sekolah karena alasan ekonom.
 - b) Orang tua/wali: Dari anak-anak putus sekolah tersebut.
 - c) Guru/Kepala Sekolah SMP: Dari sekolah asal anak putus sekolah.
 - d) Pihak Dinas Pendidikan: Bidang yang menangani wajib belajar/putus sekolah.
 - e) Pihak Dinas Sosial: Terkait program bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga.
 - f) Tokoh Masyarakat/LSM: Yang peduli pada isu pendidikan dan kemiskinan.
 - g) Pihak lain yang relevan: Misalnya, kepala desa/lurah, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), dll.
- 6) Penyusunan Instrumen Penelitian ;

- a) Pedoman Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, pandangan, dan harapan informan.
- b) Pedoman Observasi: Untuk mencatat kondisi lingkungan keluarga dan sekolah, jika memungkinkan dan relevan.
- c) Panduan Dokumentasi: Untuk mengumpulkan data dari dokumen (laporan dinas, data sekolah, dll.)

Tahap 2: Pengumpulan Data

- a) Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara tatap muka dengan seluruh informan kunci. Penting untuk menciptakan suasana yang nyaman agar informan mau berbagi informasi secara terbuka. Rekam wawancara (dengan izin) untuk analisis verbatim.
- b) Observasi Partisipatif/Non-Partisipatif: Mengamati lingkungan keluarga, interaksi sosial, dan kondisi sekolah untuk mendapatkan konteks tambahan.
- c) Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait, seperti:
- d) Data statistik putus sekolah dari Dinas Pendidikan atau BPS.
- e) Data penerima bantuan sosial atau program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- f) Laporan atau program kerja terkait penanggulangan anak putus sekolah dari dinas terkait.

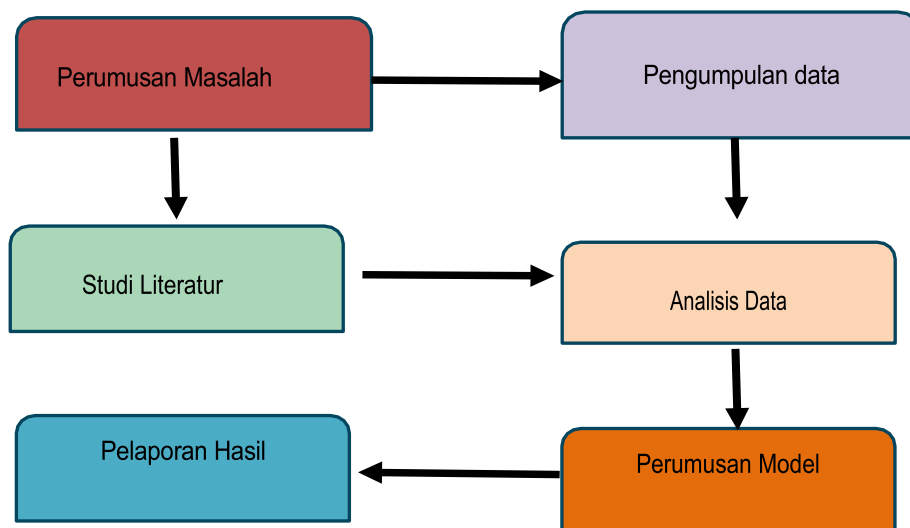
Tahap 3: Analisis Data

- 1) Transkripsi Data: Mengubah rekaman wawancara menjadi teks tertulis (verbatim).
- 2) Reduksi Data: Memilah, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah untuk mendapatkan pola-pola penting.
- 3) Penyajian Data: Mengorganisir data dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman.
- 4) Interpretasi Data dan Verifikasi (Triangulasi).
- 5) Koding: Mengidentifikasi tema-tema, kategori, dan konsep-konsep kunci dari data.
- 6) Analisis Tematik: Mengembangkan narasi berdasarkan tema-tema yang muncul.
- 7) Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai informan (anak, orang tua, guru, dinas) untuk memeriksa konsistensi dan validitas data.
- 8) Triangulasi Metode: Jika menggunakan observasi dan dokumentasi, bandingkan dengan hasil wawancara.

- 9) Membuat Kesimpulan: Merumuskan temuan penelitian berdasarkan interpretasi data.

Tahap 4: Pelaporan Penelitian

- 1) Penyusunan Draf Laporan Penelitian: Menuliskan hasil penelitian secara sistematis, mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta rekomendasi.
- 2) Pembahasan Temuan: Menganalisis temuan dengan mengaitkannya pada teori dan penelitian sebelumnya. Diskusikan implikasi temuan untuk praktik dan kebijakan.
- 3) Perumusan Kesimpulan: Merangkum temuan utama yang menjawab tujuan penelitian.
- 4) Perumusan Rekomendasi Strategi Penanggulangan: Mengembangkan rekomendasi yang praktis dan dapat diterapkan untuk pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya menanggulangi anak putus sekolah karena faktor ekonomi.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

3) Komposisi Peneliti dan Pembagian Tugas

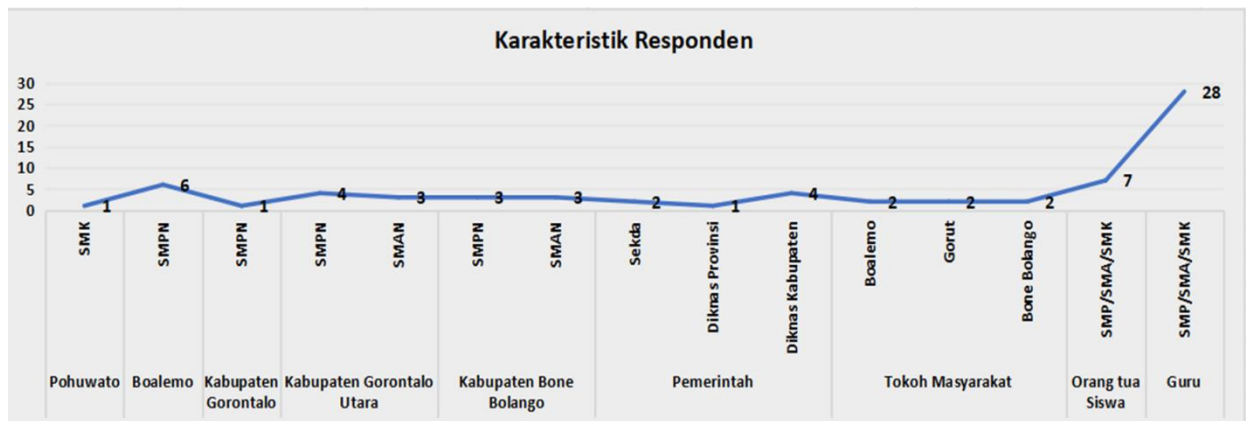
No	Nama/NIDN	Uraian Tugas
1	Dr. Muchtar Ahmad.,S.PD.,M.Si.,CIT	1. Bertanggung jawab atas keseluruhan tahapan penelitian sesuai tujuan. 2. Bertanggung jawab dalam penyusunan laporan.
2	Dr. Rustam Tohopi.,S.Pd.,M.Si	1. Membantu Pengumpulan data dan Pengolahan data penelitian sesuai tujuan. 2. Membantu dalam penyusunan laporan.
3	Mahyudin Humalangi, SE, M.Si	1. Bertanggung jawab penyediaan data dan dokumen perencanaan. 2. Bertanggung jawab terhadap proses administrasi keuangan.

1.7 Hasil Penelitian

1.7.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai profil peserta yang terlibat, sehingga dapat menggambarkan konteks data dan memperkuat interpretasi hasil penelitian.

Gambar 1 ; Karakteristik Responden



Sumber ; Data olah Tahun 2025

Karakteristik responden dianalisis untuk mengetahui komposisi demografis peserta penelitian, seperti SMP, SMA, SMK, pemerintah, tokoh masyarakat, guru dan orang tua siswa tingkat pendidikan, dan status pekerjaan, guna memahami latar belakang responden yang berkontribusi dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi objek utama adalah daerah yang tingkat IPM nya rendah tahun 2024 sebagaimana data statistik Provinsi Gorontalo.

Untuk mendukung pemahaman terhadap temuan penelitian, peneliti memaparkan karakteristik responden yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan demografis. Karakteristik ini diharapkan dapat menunjukkan representasi kelompok yang menjadi fokus penelitian.

Pada bagian ini disajikan deskripsi karakteristik responden yang berpartisipasi dalam penelitian. Pemaparan ini mencakup informasi mengenai identitas demografis dasar dan variabel sosial-ekonomi yang relevan. Penyajian karakteristik responden memberikan landasan dalam memahami konteks temuan serta memastikan bahwa analisis selanjutnya dilakukan secara proporsional sesuai dengan profil populasi yang diteliti.



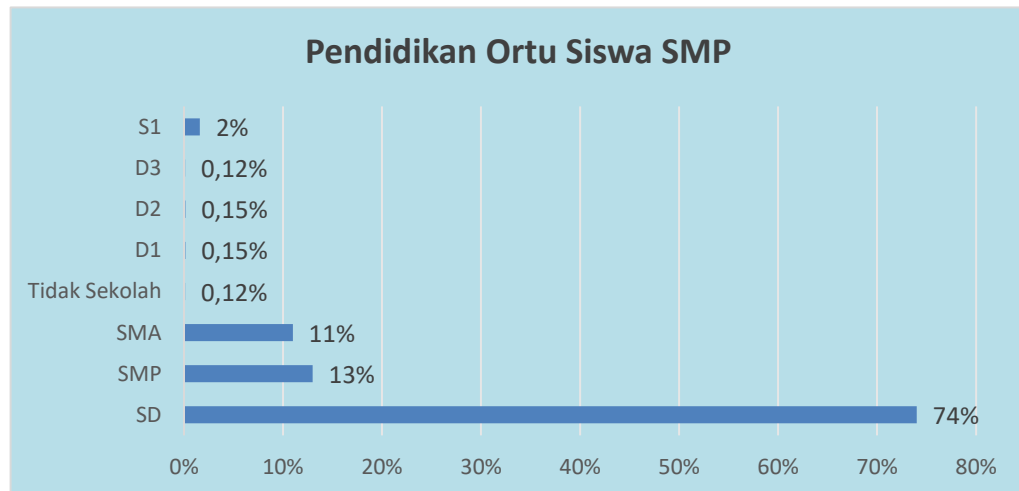
Sumber ; Data Olahan tahun 2025

1.7.2 Mengidentifikasi masalah inti Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah karena faktor sosial - ekonomi keluarga di Provinsi Gorontalo.

Identifikasi masalah inti dalam penanggulangan anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi keluarga masih menjadi penyebab dominan yang menghambat keberlanjutan pendidikan anak. Kondisi ini menuntut analisis yang lebih mendalam untuk merumuskan strategi penanggulangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal ini nampak pada pola Kemiskinan keluarga menjadi penyebab utama. Orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah (seragam, transportasi, dan uang saku). dan Anak terpaksa bekerja membantu keluarga mencari nafkah. Serta beberapa keluarga mengutamakan anak laki-laki untuk sekolah, sedangkan anak perempuan lebih diprioritaskan membantu di rumah atau menikah dini.

Sementara dari faktor perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi kestabilan anak, membuat anak kehilangan semangat belajar. Kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak. Orang tua tidak peduli pendidikan, atau berlatar belakang pendidikan rendah. Sebagaimana data objektif berdasarkan sampel eksidental:

1) Pendidikan Orang Tua siswa di level Sekolah Menengah Pertama



Sumber ; Data Olahan Tahun 2025

Data menunjukkan bahwa 74% orang tua siswa hanya berpendidikan SD, disusul 13% SMP dan 11% SMA. Artinya, 98% orang tua tidak memiliki pendidikan tinggi, dan hanya 2% yang mencapai S1. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar keluarga berada pada latar pendidikan rendah dari jumlah peserta didik 819, yang berpotensi kuat mempengaruhi pola pikir, kemampuan mendampingi anak dalam menguatkan visi membangun masa depan, dan prioritas terhadap pendidikan terkesan dianggap wajar anak tidak sekolah karena pengalaman masa lalu orang tua siswa.



Sumber : Dokumentasi lapangan, 2025

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pendidikan orang tua berpengaruh pada:

- 1) Pemahaman nilai penting pendidikan,
- 2) Kepercayaan diri dalam mendukung kegiatan akademik anak.
- 3) Pengambilan keputusan terkait keberlanjutan sekolah,

4) Kemampuan memberikan lingkungan belajar yang kondusif.

Dengan dominasi pendidikan SD, ada kemungkinan bahwa sebagian orang tua: 1) kurang memahami konsekuensi jangka panjang putus sekolah, 2) kurang mampu mendukung anak dalam kegiatan belajar, dan 3) lebih rentan memprioritaskan anak untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga.

Dilihat dari kerentanan sosial ekonomi aspek tingkat pendidikan rendah orang tua dapat berkaitan dengan:

- 1) Pekerjaan informal
- 2) Penghasilan tidak stabil
- 3) Keterbatasan akses layanan sosial
- 4) Rendahnya literasi keuangan

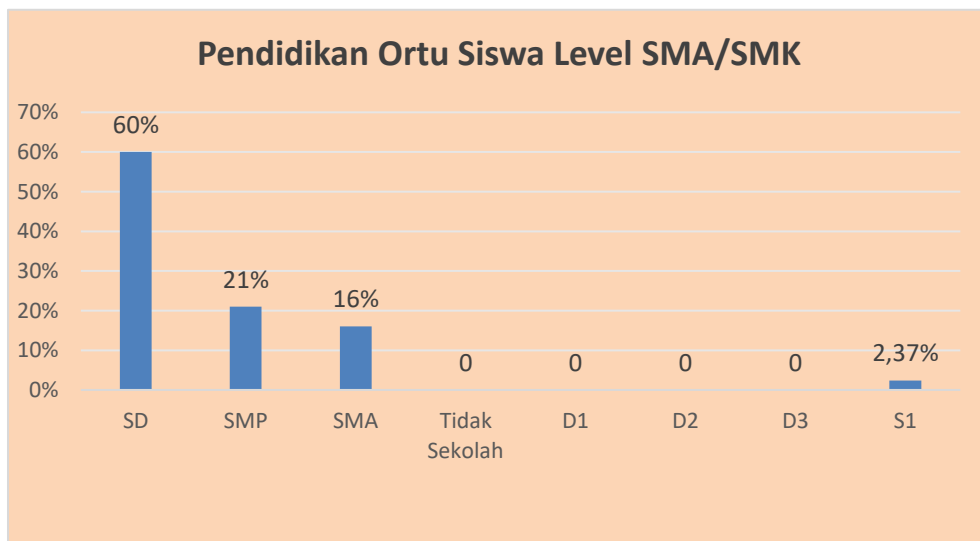
Kondisi ini memperlihatkan bahwa anak-anak dari keluarga ini rentan terhadap risiko putus sekolah, baik karena faktor ekonomi langsung maupun karena kurangnya dukungan pendidikan dari rumah.

Data mengenai tingkat pendidikan orang tua siswa pada level sekolah menengah pertama menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua memiliki latar belakang pendidikan rendah. Sebanyak 74 persen orang tua hanya menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sedangkan 13 persen menamatkan SMP dan 11 persen menamatkan SMA. Sementara itu, proporsi orang tua yang menempuh pendidikan tinggi sangat kecil, yaitu hanya 2 persen yang menyelesaikan jenjang S1, dan kurang dari 1 persen pada jenjang D1, D2, dan D3.

Dominasi pendidikan rendah ini memberikan gambaran bahwa mayoritas keluarga siswa berada dalam lingkungan yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan akademik. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola asuh, motivasi pendidikan, serta kualitas pendampingan belajar yang diterima oleh anak di rumah. Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan anak untuk mengalami kesulitan belajar maupun risiko putus sekolah, terutama ketika dihadapkan pada tekanan sosial-ekonomi keluarga.

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan orang tua sebagai bagian penting dalam analisis akar masalah. Pendidikan orang tua yang rendah tidak hanya berdampak pada rendahnya dukungan akademik, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat sosial-ekonomi keluarga secara keseluruhan.

2) Pendidikan Orang Tua Siswa di Level SMA dan SMK



Sumber : Data Olahan Tahun 2025

Sementara itu data komposisi pendidikan orang tua siswa SMA/SMK sangat terkonsentrasi pada tingkat pendidikan orang tua siswa yang memiliki karakter yang sama namun tidak sebesar pada level pendidikan orangtua siswa SMP, dimana untuk kualifikasi pendidikan orangtua siswa pada level sekolah menengah atas dan menengah kejuruan masih di dominasi pada kualifikasi pendidikan orangtua siswa seperti pendidik dasar (SD): 60%. tingkat SMP 21%, tingkat SMA 16%, dan lulusan perguruan tinggi strata-1 (S1) hanya 2,37%. Kategori menengah–tinggi (D1–D3, S1) sangat kecil; kategori tidak sekolah $\approx 0\%$ (grafik menunjukkan nol). Rasio orang tua berlatar SD terhadap yang S1 kira-kira ~ 25 kali ($60 / 2,37 \approx 25,3$), menandakan dominasi pendidikan rendah orang tua dari peserta didik yang jumlah 1.528.

Dengan melihat sebaran data tersebut, peneliti melihat akan memiliki beberapa dampak terhadap lingkungan belajar di rumah. Pengetahuan dan praktik pendidikan di rumah kemungkinan terbatas (bantuan pekerjaan rumah, pembelajaran daring, literasi akademik). Eksposur anak terhadap lingkungan kultural/akademik yang memacu pendidikan tinggi cenderung rendah. Hubungan dengan status ekonomi rumah tangga.

Latar pendidikan orang tua yang rendah sering berkorelasi dengan pendapatan rumah tangga yang lebih rendah dan pekerjaan non-formal. Ini bisa membatasi akses ke sumber belajar berbayar, bimbingan belajar, maupun fasilitas teknologi. Aspirasi dan orientasi karir siswa. Dimana siswa dari rumah tangga

dengan orang tua berpendidikan rendah lebih mungkin memilih jalur langsung kerja atau vokasi (SMK) ketimbang melanjutkan ke perguruan tinggi; keputusan ini dapat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga dibutuhkan peran dukungan sekolah dan guru menjadi kritikal, bagi sekolah dan guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi sumber informasi dan motivasi mengenai pendidikan lanjutan—peran ini harus ditingkatkan. Bahkan risiko ketidaksetaraan antar generasi, jika pola ini tidak diintervensi, ada risiko reproduksi kemiskinan / pendidikan rendah ke generasi berikutnya.

Analisis terhadap data pendidikan orang tua siswa SMA/SMK menunjukkan bahwa mayoritas orang tua hanya menamatkan pendidikan dasar (SD) sebesar 60%. Tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA) masing-masing sebesar 21% dan 16%, sedangkan tingkat pendidikan tinggi (S1) hanya 2,37%. Distribusi ini menandakan bahwa latar belakang pendidikan keluarga bagi sebagian besar siswa berada pada kategori rendah hingga menengah rendah.

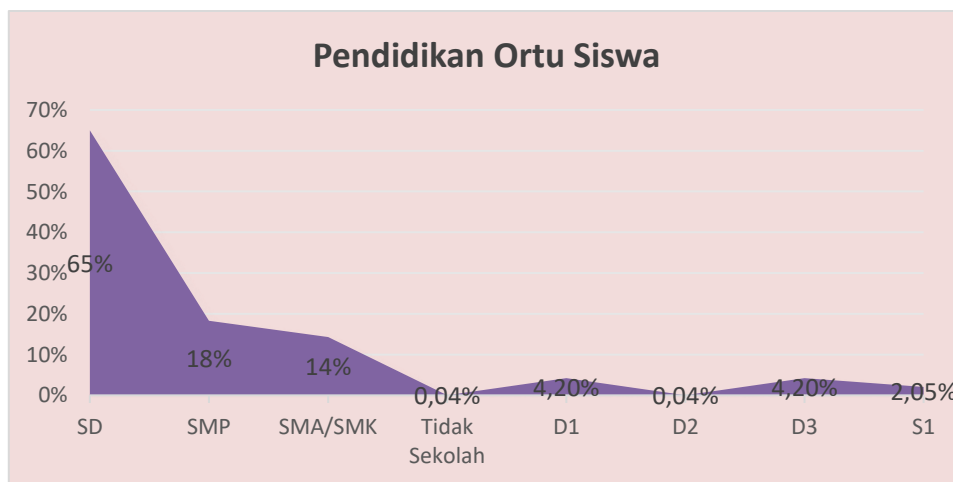


Sumber : Dokumentasi Lapangan. 2025

Konsentrasi tinggi pada pendidikan dasar mengindikasikan dua hal utama: pertama, kapasitas dukungan akademik di rumah (mis. pendampingan belajar, akses literasi, pemahaman kurikulum) cenderung terbatas; kedua, tekanan ekonomi keluarga mungkin mempengaruhi keputusan pendidikan anak—baik pada pilihan jalur (SMK vs SMA) maupun kemungkinan melanjutkan ke perguruan tinggi. Temuan ini relevan untuk memahami determinan partisipasi pendidikan lanjutan, hasil belajar, dan risiko putus sekolah. Intervensi terintegrasi yang menysasar keluarga (pendidikan orang tua, dukungan ekonomi) dan sekolah (bimbingan, program penguatan belajar) menjadi kebutuhan strategis untuk memutus lingkaran keterbatasan pendidikan antar generasi.

3) Pendidikan Orang Tua Siswa di Level SMP, SMA dan SMK.

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai pendidikan terakhir orang tua siswa pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, ditemukan bahwa komposisi tingkat pendidikan keluarga cenderung terpusat pada kategori pendidikan dasar. Data menunjukkan bahwa sekitar 65% orang tua siswa hanya menamatkan sekolah dasar (SD). Diikuti oleh lulusan SMP sebesar 18% dan lulusan SMA/SMK sebesar 14%. Sementara itu, persentase pendidikan tinggi berada pada nilai yang relatif kecil, yaitu D1 sebesar 4,20%, D3 sebesar 4,20%, D2 sekitar 0,04%, dan lulusan S1 sebesar 2,05%. Adapun kategori “tidak sekolah” tercatat sangat kecil yaitu hanya sekitar 0,04%.



Sumber: Data Olahan Tahun 2025

Hasil ini secara umum menggambarkan bahwa mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah hingga menengah rendah. Kelompok orang tua dengan pendidikan menengah dan tinggi jumlahnya belum signifikan sehingga belum mampu menciptakan lingkungan sosial pendidikan yang dominan bagi terwujudnya aspirasi anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dominasi pendidikan Orang Tua Siswa yang rendah akan berimplikasi terhadap dukungan pendidikan anak di rumah. Dimana hasil penelitian melihat proporsi terbesar lulusan SD menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa tidak memiliki pengalaman pendidikan yang cukup panjang untuk memahami kebutuhan belajar anak pada jenjang menengah. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan orang tua dalam memberikan bantuan akademik di rumah, seperti memandu pekerjaan rumah, memahami materi pelajaran

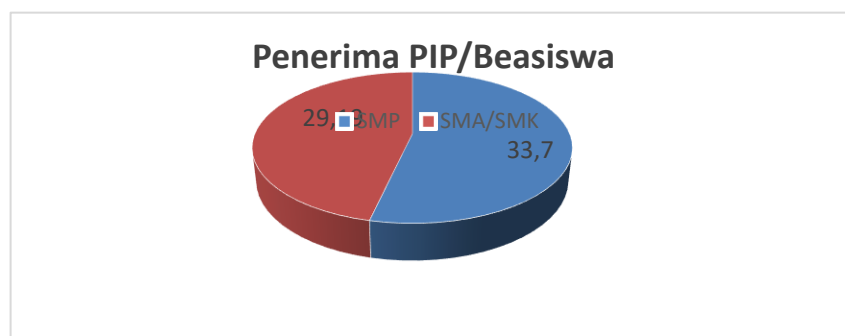
berbasis kurikulum baru, ataupun mengakses sumber belajar daring. Keterbatasan literasi akademik di tingkat keluarga berpotensi menurunkan kualitas dukungan sosial yang dibutuhkan siswa agar dapat berkembang optimal di sekolah.

Selain itu, rendahnya pendidikan orang tua seringkali berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendapatan dan pekerjaan informal. Hal ini turut mempengaruhi kemampuan keluarga dalam menyediakan fasilitas belajar seperti buku tambahan, gawai, koneksi internet, atau layanan bimbingan belajar. Akibatnya, kesenjangan kemampuan belajar antar siswa dari keluarga berpendidikan rendah dan tinggi dapat semakin melebar.

Pengaruh terhadap aspirasi pendidikan. Dari perspektif sosial-budaya, tingkat pendidikan orang tua memiliki hubungan erat dengan aspirasi pendidikan anak. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung memiliki ekspektasi yang terbatas terhadap pencapaian pendidikan anak, misalnya mendorong anak untuk bekerja setelah tamat SMK atau memilih jalur yang dianggap cepat menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat memengaruhi pilihan siswa pada jenjang SMA/SMK serta motivasi mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Dengan persentase lulusan diploma dan sarjana yang hanya berkisar antara 2–4%, eksposur siswa terhadap figur panutan (role model) yang berlatar pendidikan tinggi juga menjadi minim. Secara sosiologis, ketidaksetaraan akses terhadap figur inspiratif dapat membatasi wawasan dan orientasi siswa terhadap prospek pendidikan di masa depan.

4) Peserta Didik Penerima Beasiswa atau PIP.



Sumber: Data olahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa pada tingkat SMP dan SMA/SMK, ditemukan bahwa

tingkat penerimaan bantuan pendidikan terbesar berada pada jenjang SMP dengan persentase 33,7%. Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK, persentase penerima tercatat 29,19%. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi penerima bantuan pendidikan masih relatif besar pada kedua jenjang, namun terdapat perbedaan proporsi di mana SMP memiliki cakupan penerima yang lebih tinggi.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui dua konteks. Pertama, prioritas program pemerintah lebih berfokus pada upaya pencegahan anak putus sekolah pada masa wajib belajar sembilan tahun, sehingga jenjang SMP cenderung lebih banyak memperoleh alokasi PIP. Hal ini selaras dengan tujuan PIP untuk menjamin kelanjutan pendidikan dasar bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Kedua, penurunan persentase penerima PIP pada jenjang SMA/SMK mencerminkan adanya hambatan akses yang mungkin bersifat administratif, sosio-ekonomi, maupun struktural.

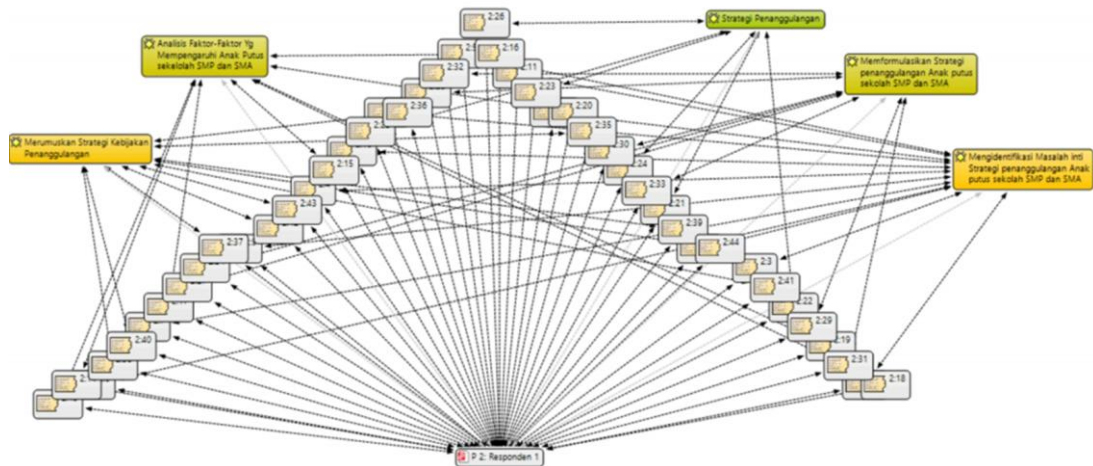
Penurunan premi bantuan pada jenjang menengah atas dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan siswa. Pada tingkat ini, biaya pendidikan cenderung lebih tinggi, terutama pada sekolah kejuruan (SMK) yang mensyaratkan pengeluaran tambahan untuk peralatan praktik, magang, dan kebutuhan kejuruan lainnya. Dalam kondisi orang tua dengan pendidikan rendah dan kemampuan ekonomi terbatas (sebagaimana ditunjukkan data sebelumnya), banyak keluarga menghadapi keterbatasan dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak di SMA/SMK. Tanpa bantuan PIP atau beasiswa, risiko anak putus sekolah meningkat secara signifikan.

Selain itu, rendahnya jumlah penerima di SMA/SMK juga berpotensi menciptakan ketidakmerataan kesempatan pendidikan. Jika siswa miskin yang tidak memperoleh beasiswa terhambat untuk melanjutkan pendidikan, maka kemungkinan besar mereka akan memasuki pasar kerja informal lebih awal. Kondisi ini dapat memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi.

Dengan demikian, hasil ini menegaskan pentingnya memastikan keberlanjutan penerima PIP dari SMP ke SMA/SMK, serta perlunya program tambahan untuk mendorong ketahanan siswa dalam menyelesaikan pendidikan menengah. Peningkatan komunikasi sekolah-orang tua, sosialisasi syarat PIP, serta pendataan yang lebih akurat perlu diperkuat agar siswa dari keluarga rentan tidak terlewat dalam proses seleksi bantuan pendidikan.

1.7.3 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Anak Putus Sekolah karena faktor sosial ekonomi keluarga dan Strategi Penanggulangannya di Provinsi Gorontalo.

Anak putus sekolah di Gorontalo dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi (kemiskinan, kebutuhan pendapatan keluarga, biaya tidak langsung sekolah), faktor keluarga (rendahnya pendidikan orang tua, struktur keluarga besar/single parent), faktor sekolah (jarak, biaya praktik/kejuruan, kualitas pengajaran), serta kelemahan tata kelola kebijakan (pendataan tidak tuntas, cakupan bantuan yang terputus antar jenjang). Intervensi efektif harus multisector, menggabungkan bantuan finansial, penguatan layanan sekolah, peningkatan kapasitas keluarga, dan sistem data/monitoring yang solid.



Sumber: Data Olahan Kualitatif Atlas Tahun 2025

a) Faktor Penyebabnya:

(1) Keterbatasan ekonomi rumah tangga

- Pendapatan keluarga tidak mencukupi; biaya pendidikan langsung & tidak langsung (seragam, praktik SMK, transport) menjadi beban.
- Kebutuhan likuid jangka pendek mendorong anak bekerja (child labour) sehingga berhenti sekolah.

(2) Pendidikan orang tua rendah

- Orang tua lulusan SD/SMP kurang mampu mendampingi belajar, memotivasi lanjut pendidikan, atau mengakses informasi beasiswa/dukungan.

- Hasil survei lokal (grafik pendidikan orang tua) menunjukkan dominasi lulusan SD korelasi kuat dengan risiko putus sekolah.



Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2025

(3) Biaya dan relevansi SMK/SMA

- SMK sering memerlukan alat praktik dan biaya tambahan; keluarga miskin memilih menghentikan pendidikan atau memasukkan anak ke pasar kerja prematur.
- Kurikulum yang dirasakan tidak relevan menaikkan motivasi keluar sekolah.

(4) Akses geografis & infrastruktur

Jarak ke sekolah menengah atas, buruknya transportasi, dan fasilitas sekolah yang kurang memadai meningkatkan hambatan hadir rutin.

(5) Kelemahan sistem identifikasi & bantuan

PIP/beasiswa tidak selalu tersambung antar jenjang; administrasi dan verifikasi data (NISN/Dapodik) lemah anak yang semestinya berhak terlewat dan terkesan tanpa solusi.

(6) Faktor sosial-budaya

Norma peran gender (anak perempuan dikawinkan/dirumahkan), tekanan kultural untuk bekerja, dan rendahnya aspirasi pendidikan di komunitas.

Analisis data menunjukkan bahwa akar utama putus sekolah di Gorontalo adalah faktor ekonomi rumah tangga yang diperkaya oleh latar pendidikan orang tua yang rendah. Anak dari keluarga berpendidikan dasar rentan menjadi pekerja anak atau berhenti ketika menyentuh jenjang yang memerlukan biaya lebih tinggi (SMA/SMK). Meskipun program bantuan seperti PIP menjangkau sebagian, cakupannya menurun pada jenjang menengah atas sehingga keberlanjutan pendidikan terancam. Selain aspek finansial,

kelemahan tata kelola, termasuk pendataan yang tidak terintegrasi dan minimnya mekanisme penelusuran siswa berisiko, memperbesar peluang kelompok anak rentan terlewatkan. Sekolah berperan ganda; sebagai penyedia pembelajaran dan sebagai titik intervensi sosial; namun peran ini kurang optimal apabila tidak didukung sumber daya, pelatihan guru, dan kemitraan komunitas/industri.

b) Implikasi Kebijakan yang Prioritas dalam penganggulan anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo.

- (1) Jaminan keberlanjutan bantuan pendidikan antar jenjang
Integrasikan data penerima PIP/sosial dengan NISN/Dapodik untuk otomatis memindahkan hak bantu dari SMP, SMA/SMK.
- (2) Paket bantuan komprehensif untuk keluarga rentan
PIP/beasiswa yang menutupi biaya tidak langsung (alat praktik SMK, transport, seragam) dan bersyarat kehadiran/partisipasi orang tua pada program parenting.
- (3) Penguatan layanan sekolah sebagai safety net
Bimbingan karir, remedial, learning center, dan program fleksibel (shift malam, program akselerasi/alternatif) untuk anak pekerja.
- (4) Program peningkatan kapasitas keluarga
Sosialisasi atau penguatan literasi dasar, parenting edukatif, dan pelatihan kewirausahaan agar rumah tangga punya alternatif pendapatan.
- (5) Perkuat kemitraan SMK–industri & pembiayaan alat praktik
Skema CSR/peralatan magang yang menurunkan beban keluarga.
- (6) Sistem deteksi dini & respons cepat (Early Warning System)
Seperti absensi, nilai menurun, keterlambatan pembayaran komponen sekolah tim sekolah/kelurahan menindaklanjuti.

c) Strategi Penanggulangan

- (1) Jangka pendek (0–12 bulan)
 - Audit data penerima bantuan; daftar urut prioritas siswa berisiko.
 - Tujuan Beasiswa di 3 kecamatan dengan paket biaya SMK (alat + transport) + parenting sessions.
 - Mekanisme [HELPDESK](#) sekolah untuk administrasi PIP.

(2) Menengah (1–3 tahun)

- Skema beasiswa transisi otomatis dari SMP, SMA/SMK; subsidi alat praktik.
- Perluasan learning centers & program kerja sambil belajar; pelatihan guru untuk bimbingan dan manajemen kasus.
- Program literasi dan peluang usaha mikro bagi orang tua.

(3) Jangka panjang (3–7 tahun)

- Reformasi kebijakan lokal: anggaran pendidikan inklusif, integrasi data lintas dinas (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan).
- Cultural change campaigns: nilai pendidikan dan peluang karir tinggi.
- Investasi infrastruktur (transportasi sekolah).

1.7.4 Memformulasikan Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Provinsi Gorontalo melalui Program Penanganan Melalui Penanganan Faktor Sosial dan Ekonomi Keluarga.

Akar putus sekolah di Gorontalo didominasi oleh faktor ekonomi rumah tangga (kemiskinan, kebutuhan likuid), dilipatgandakan oleh rendahnya pendidikan orang tua, biaya tidak langsung sekolah (alat praktik SMK, transport), dan kendala administrasi penerima bantuan.

Intervensi bersifat multidimensi harus menargetkan keluarga (bukan hanya siswa) kombinasi bantuan finansial, penguatan kapasitas orang tua, kemudahan akses administrasi bantuan, serta layanan sekolah sebagai safety-net adalah kunci.

Analisisnya mengapa faktor sosio-ekonomi keluarga menyebabkan anak putus sekolah antara lain:

- 1) Kebutuhan ekonomi jangka pendek; keluarga memprioritaskan penghasilan saat ini, anak bekerja dan memilih putus sekolah.
- 2) Biaya tidak langsung sekolah meningkat pada jenjang menengah (SMK: alat praktik; SMA: transport, biaya tambahan) beban tambahan memaksa keluarganya menghentikan pendidikan anak.
- 3) Rendahnya pendidikan orang tua keterbatasan kemampuan mendampingi belajar, mengakses informasi beasiswa, dan menanamkan aspirasi pendidikan → keputusan penghentian pendidikan.

- 4) Kelemahan tata kelola bantuan bantuan PIP/beasiswa tidak berkelanjutan dari SMP, SMA/SMK atau administrasi mempersulit pencairan penerima potensial terlewatkan.
- 5) Faktor sosial-budaya dan gender norma yang mendorong anak perempuan berhenti sekolah lebih cepat (pernikahan dini, pekerjaan rumah), menguatkan risiko putus sekolah.

Data dan analisis penelitian menunjukkan bahwa putus sekolah di Provinsi Gorontalo bukan sekadar masalah pendidikan teknis, melainkan fenomena sosial-ekonomi. Mayoritas anak yang berhenti sekolah berasal dari keluarga berpendapatan rendah, kurangnya motivasi diri, rendahnya dorongan orangtua, kebiasaan malas yang membudaya dan orang tua yang pendidikan akhirnya terbatas kombinasi ini mengurangi kemampuan keluarga untuk menanggung biaya pendidikan langsung maupun tidak langsung. Program bantuan yang ada (mis. PIP) telah memberikan dampak tetapi belum efisien menjamin keberlanjutan antar jenjang pendidikan. Ketiadaan mekanisme transisi otomatis, plus hambatan administratif, menyebabkan beberapa siswa miskin kehilangan akses bantuan saat memasuki SMA/SMK, periode ketika biaya sering meningkat. Selain itu, kurangnya literasi orang tua dalam memanfaatkan peluang pendidikan (beasiswa, jalur non-formal) turut menghambat peluang anak melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, intervensi harus mengatasi hambatan finansial sekaligus meningkatkan kapabilitas keluarga dan sistem deteksi dini di sekolah/kelurahan.

1.7.5 Merumuskan Strategi Kebijakan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Faktor Sosial - Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo.

Anak putus sekolah di Gorontalo terutama dipengaruhi oleh kendala sosial-ekonomi keluarga; pendapatan rumah tangga yang rendah, biaya tidak langsung pendidikan (alat praktik SMK, transport, seragam), rendahnya pendidikan orang tua, serta celah tata kelola bantuan pendidikan (mis. transisi PIP). Untuk menurunkan angka putus sekolah diperlukan strategi kebijakan terintegrasi yang menargetkan keluarga (bukan hanya siswa), memperbaiki mekanisme bantuan, memperkuat peran sekolah sebagai safety net, dan membangun sistem deteksi dini berbasis data.

Bukti empirisnya, Latar pendidikan orang tua; data grafik sebelumnya menunjukkan dominasi orang tua lulusan SD (~60–65%), SMP ~18–21%, SMA/SMK ~14–16%, S1 sangat kecil (~2%). Kondisi ini memperbesar risiko rendahnya dukungan akademik dan rendahnya aspirasi pendidikan di rumah.

Cakupan PIP/beasiswa: Cakupan penerima PIP tercatat lebih tinggi di tingkat SMP (33,7%) dibanding SMA/SMK (29,19%). Menurun pada jenjang atas ini menunjukkan potensi kebocoran bantuan atau putusnya keberlanjutan dukungan tepat ketika kebutuhan biaya meningkat.

Kombinasi dua poin di atas mengindikasikan korelasi kuat antara pendidikan orang tua, kapasitas ekonomi keluarga, dan risiko putus sekolah. Catatan metodologis: analisis ini berangkat dari data deskriptif grafis yang Anda lampirkan; untuk pengujian kausal diperlukan data kuantitatif terperinci (variabel pendapatan, pekerjaan, jarak sekolah, dsb.) dan analisis multivariat.

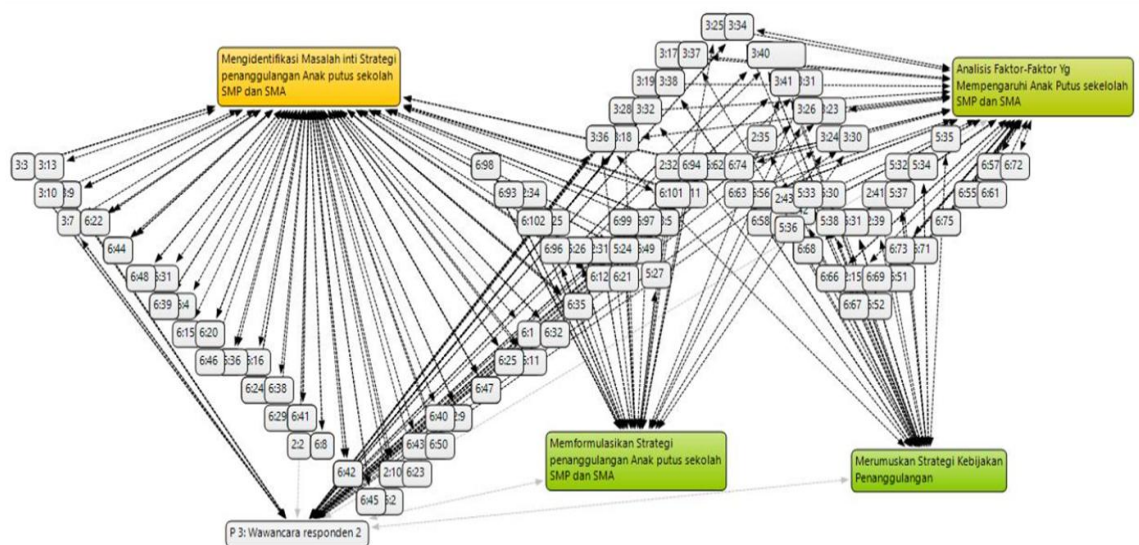
Faktor sosial-ekonomi mendorong putus sekolah:

- 1) Beban biaya tidak langsung meningkat pada jenjang menengah atas keluarga miskin memilih menghentikan pendidikan.
- 2) Kebutuhan pendapatan keluarga (child labour atau kontribusi upah anak) mengurangi waktu dan kapasitas belajar kena risiko putus.
- 3) Kurangnya literasi & kapasitas orang tua rendahnya pendampingan belajar dan akses ke informasi beasiswa siswa rentan terlewat.
- 4) Kelemahan mekanisme PIP/transisi antar jenjang penerima potensial kehilangan akses bantuan saat memasuki SMA/SMK.
- 5) Norma sosial & gender (mis. tekanan menikah dini atau prioritas kerja bagi anak perempuan/laki) mempercepat penghentian sekolah pada kelompok tertentu.

Strategi efektif untuk menurunkan putus sekolah di Gorontalo harus menempatkan keluarga sebagai sasaran utama: menyatukan bantuan finansial berkelanjutan, kapasitas orang tua, peran sekolah yang diperkuat, dan sistem data yang mengawasi transisi antar jenjang. Pendekatan multisektoral yang dipilotkan, dievaluasi, lalu diskalakan dengan dukungan APBD dan mitra lokal menawarkan jalan paling realistis untuk memutus siklus pendidikan rendah dan meningkatkan mobilitas sosial generasi muda Gorontalo.

1.8 Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Data lapangan mengonfirmasi bahwa sebagian besar kasus putus sekolah dipengaruhi oleh keterbatasan sosial-ekonomi keluarga, rendahnya dukungan lingkungan, dan minimnya akses terhadap layanan pendidikan yang inklusif.



Sumber: Data Olahan Kualitatif

Secara umum, terdapat tiga kelompok faktor yang paling dominan mendorong anak berhenti sekolah:

1) Faktor Ekonomi Keluarga

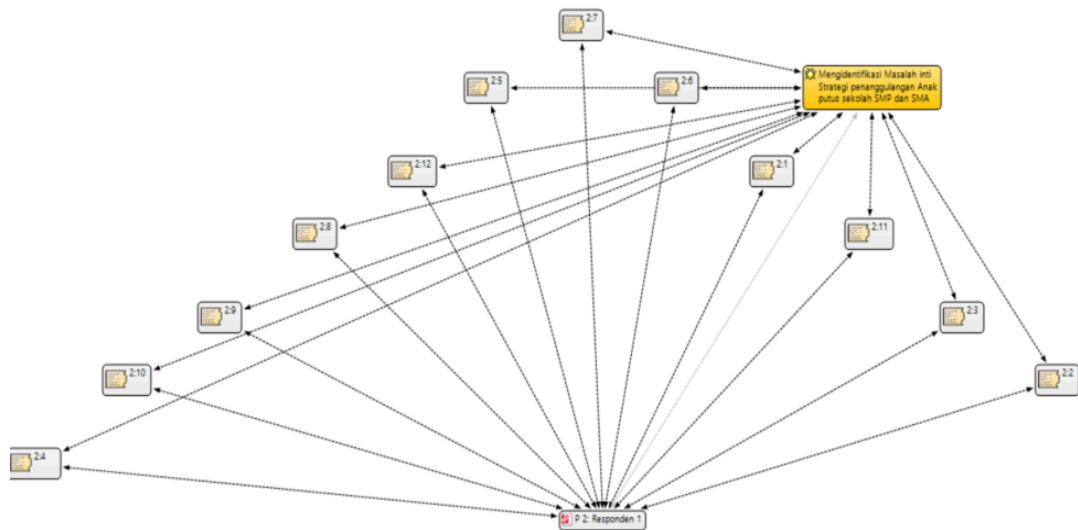
Kondisi keluarga berpenghasilan rendah, pekerjaan orang tua yang tidak tetap, dan beban ekonomi rumah tangga mendorong anak memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah. Banyak keluarga harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar daripada pendidikan anak.

2) Faktor Sosial Keluarga dan Lingkungan

Rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya pengawasan belajar, disharmoni keluarga, serta pengaruh teman sebaya membuat anak rentan meninggalkan pendidikan. Sikap keluarga yang kurang memandang sekolah sebagai investasi jangka panjang juga memperkuat keputusan anak untuk berhenti sekolah.

3) Faktor Aksesibilitas dan Layanan Pendidikan

Di wilayah perdesaan, jarak sekolah yang jauh, minimnya sarana transportasi, dan kurangnya fasilitas belajar mempengaruhi rendahnya minat anak untuk tetap bersekolah. Sebagian sekolah juga belum memiliki mekanisme deteksi dini terhadap siswa berisiko putus sekolah.



Sumber: Data Olahan Kualitatif

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi determinan paling kuat. Rumah tangga miskin di Gorontalo cenderung memiliki pengeluaran untuk pendidikan yang sangat terbatas. Anak sering kali beralih menjadi pencari nafkah tambahan melalui pekerjaan informal seperti buruh tani, pekerja warung, atau pekerjaan serabutan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural dan ketidakstabilan ekonomi menjadi akar masalah utama. Sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain:

1.8.1 Faktor Sosial Keluarga

Faktor sosial sangat berdampak pada penguatan mental anak untuk dapat melanjutkan sekolah, sementara aspek tingkat pendidikan orang tua berhubungan signifikan dengan keputusan anak untuk melanjutkan sekolah. Orang tua dengan pendidikan rendah sering kali tidak mampu memberikan motivasi yang cukup dan kurang memahami pentingnya pendidikan dalam mobilitas sosial. Selain itu, pola relasi keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya komunikasi memperparah risiko anak meninggalkan sekolah.

1.8.2 Faktor Budaya dan Lingkungan

Di beberapa daerah, terdapat pandangan bahwa bekerja pada usia muda lebih bermanfaat secara ekonomi daripada bersekolah. Lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti pergaulan bebas, budaya menikah muda, dan rendahnya role model pendidikan, turut memperbesar potensi anak berhenti sekolah.

1.8.3 Akses Layanan Pendidikan

Keterbatasan infrastruktur pendidikan, rasio guru yang belum merata, serta kurangnya layanan konseling sekolah membuat deteksi siswa berisiko putus sekolah berlangsung lambat. Sekolah juga belum optimal menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, puskesmas, maupun dinas sosial untuk penelusuran kasus.

1.8.4 Rumusan Strategi penanggulangan

Berdasarkan temuan tersebut, strategi penanggulangan dirumuskan melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan intervensi ekonomi, sosial keluarga, dan penguatan layanan pendidikan.

1.8.5 Strategi Intervensi Ekonomi Keluarga

1) Peningkatan Bantuan Sosial Berbasis Pendidikan (*Education Conditional Cash Transfer*)

Memperkuat program bantuan dengan syarat kehadiran sekolah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin.

2) Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga

- Pelatihan keterampilan usaha keluarga miskin,
- akses permodalan UMKM kecil,
- program padat karya desa.

3) Subsidi Transportasi dan Sarana Sekolah

Khusus untuk daerah terpencil dengan jarak sekolah jauh dan fasilitas transportasi terbatas. Dengan kondisi gedung sekolah cenderung usang, kurang terawat dan kurang menguatkan semangat belajar anak dikelas dengan suasana yang panas belajar selama 8 jam dikelas.

1.8.6 Strategi Intervensi Sosial dan ketahanan Keluarga

1) Edukasi Orang Tua tentang Pentingnya Sekolah

Melalui pertemuan rutin sekolah-orang tua, penyuluhan desa, dan kampanye publik.

2) Program Konseling Keluarga dan Pencegahan Disharmoni

Mengintegrasikan peran Dinas Sosial, Puskesmas, Penggerak PKK, dan pekerja sosial masyarakat.

3) Pendampingan Anak Berisiko

Membangun sistem *Case Management* untuk anak yang menunjukkan indikator risiko seperti absensi tinggi, nilai menurun, dan perilaku menyimpang.

1.8.7 Strategi Penguatan Layanan dan Sistem Pendidikan

1) Deteksi Dini Anak Rentan Putus Sekolah

Sekolah diwajibkan membuat profil risiko siswa setiap semester.

2) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pendidikan

Tim kolaboratif terdiri dari sekolah, dinas Pendidikan, dan desa untuk merespons kasus putus sekolah dalam waktu maksimal 7 hari.

3) Peningkatan Mutu Sekolah di Daerah Terpencil

- penambahan fasilitas,
- redistribusi guru,
- penyediaan beasiswa prestasi dan bantuan perlengkapan sekolah.

4) Revitalisasi Pendidikan Nonformal

Anak yang sudah terlanjur putus sekolah dapat diarahkan ke:

- PKBM,
- Kejar Paket B/C,
- pelatihan vokasional.

Penelitian ini menegaskan bahwa anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo terutama dipengaruhi oleh kondisi sosial - ekonomi keluarga, khususnya kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, serta lemahnya ketahanan keluarga. Karena itu, strategi penanggulangan tidak dapat hanya berfokus pada sektor pendidikan, tetapi harus mengadopsi pendekatan holistik berbasis keluarga, ekonomi, dan sosial. Implementasi strategi yang terintegrasi, konsisten, dan lintas sektor diyakini mampu menurunkan angka putus sekolah secara signifikan dan menciptakan keberlanjutan akses pendidikan yang lebih adil untuk seluruh anak di Provinsi Gorontalo.

1.9 Rekomendasi

1.9.1 Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah karena Faktor Sosial-Ekonomi Keluarga di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penyebab anak putus sekolah yang didominasi oleh lemahnya kondisi sosial-ekonomi keluarga, keterbatasan akses layanan pendidikan, rendahnya literasi orang tua, serta minimnya efektivitas intervensi kebijakan pada tingkat sekolah dan desa/kelurahan, maka penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi dasar penguatan kebijakan di Provinsi Gorontalo. Rekomendasi ini disusun untuk menjawab akar masalah, memperbaiki tata kelola layanan pendidikan, serta memastikan keberlanjutan program intervensi pemerintah.

1.9.2 Penguatan Kebijakan Berbasis Keluarga (*Family-Centered Education Policy*)

Pemerintah daerah perlu menjadikan keluarga sebagai pusat intervensi dalam mencegah anak putus sekolah. Strategi ini mencakup:

- 1) Program pendampingan keluarga miskin melalui kunjungan rumah oleh guru BK, pekerja sosial, atau kader desa guna mengidentifikasi risiko lebih dini.
- 2) Peningkatan literasi pendidikan orang tua, terutama bagi keluarga berpendidikan rendah, melalui kelas parenting di sekolah atau desa.
- 3) Integrasi program pendidikan dengan layanan sosial dasar, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Pendekatan ini diyakini mampu memperkuat fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama yang menentukan keberlanjutan pendidikan anak.

1.9.3 Reformasi Bantuan Sosial Pendidikan Lebih Tepat Sasaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beasiswa seperti PIP belum sepenuhnya menjangkau anak yang paling membutuhkan. Oleh karena itu diperlukan:

- a) Verifikasi faktual berbasis desa agar penerima bantuan benar-benar dari keluarga rentan.
- b) Penetapan mekanisme early warning berbasis data anak yang menunggak SPP, sering absen, atau berpotensi drop-out.

- c) Pengalokasian bantuan khusus risiko tinggi untuk anak yang orang tuanya tidak bekerja, berpenghasilan tidak tetap, atau menghadapi krisis ekonomi.

Reformulasi ini akan meningkatkan efektivitas bantuan dalam mencegah putus sekolah sejak awal.

1.9.4 Penguatan Sistem Deteksi Dini Anak Beresiko Putus Sekolah

Perlu dibangun sistem deteksi dini yang terintegrasi antara sekolah, desa/kelurahan, dan dinas pendidikan berbasis indikator:

- 1) Ketidakhadiran berulang
- 2) Penurunan prestasi
- 3) Tunggakan biaya sekolah
- 4) Masalah sosial keluarga (kemiskinan ekstrem, perceraian, kekerasan, migrasi orang tua)

Dengan sistem ini, sekolah dapat segera mengambil langkah intervensi seperti konseling, mediasi dengan keluarga, atau menghubungkan siswa dengan program bantuan sosial.

1.9.5 Kolaborasi Multipihak (Pentahelix) Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah

Penanganan masalah ini tidak efektif bila hanya dibebankan pada sekolah. Oleh karena itu diperlukan:

- a) Kemitraan pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga masyarakat.
- b) Pemanfaatan CSR perusahaan untuk mendukung biaya pendidikan, peralatan belajar, atau pelatihan keterampilan.
- c) Penguatan peran desa/kelurahan dalam pemutakhiran data anak putus sekolah dan tindak lanjut intervensi.

Kolaborasi ini menciptakan ekosistem dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan.

1.9.6 Pengembangan Program Sekolah Ramah Anak dan Inklusif Bagi Keluarga Miskin

Rekomendasi berikut bertujuan menghilangkan hambatan sosial dan psikologis:

- 1) Menciptakan sekolah yang bebas stigma terhadap anak dari keluarga miskin.
- 2) Mengoptimalkan **layanan konseling karier dan sosial** bagi siswa yang bekerja sambil sekolah.
- 3) Memberi fleksibilitas jadwal bagi siswa yang harus membantu orang tua bekerja, tanpa mengorbankan hak belajar.

Dengan pendekatan ini, sekolah lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga siswa.

1.9.7 Perluasan Program Keterampilan dan Pendidikan Nonformal

Bagi anak yang terlanjur putus sekolah, pemerintah daerah perlu:

- a) Mengembangkan kelas keterampilan gratis (otomotif, menjahit, pertanian, tata boga, multimedia) melalui BLK dan SMK.
- b) Menyediakan program kejar paket yang dipadukan dengan pelatihan kerja.
- c) Menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk penempatan kerja bagi lulusan pelatihan.

Program ini memastikan anak tetap memiliki peluang peningkatan ekonomi dan mobilitas sosial.

1.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Secara Berkelanjutan dan Berdampak

Diperlukan sistem Monev terpadu dan berdampak untuk:

- 1) Memastikan program pencegahan dan penanggulangan putus sekolah berjalan sesuai sasaran dan berdampak pada perubahan pemahaman dan penguatan budaya lingkungan peserta didik.
- 2) Mengkaji efektivitas intervensi, terutama bagi keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menghasilkan rekomendasi kebijakan tahunan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dengan Monev rutin, pemerintah dapat cepat merespons perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Rekomendasi ini diharapkan mampu mendukung pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merumuskan strategi penanggulangan anak putus sekolah secara lebih komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan keluarga. Pendekatan yang integratif dan kolaboratif diyakini menjadi langkah kunci untuk memastikan seluruh anak di Gorontalo dapat mengakses pendidikan secara berkelanjutan.

1.10 Daftar Pustaka

1. BPS Provinsi Gorontalo
2. BPS Indonesia
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi di daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
7. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
8. Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
9. Kadek Ranti, Nengah Bawa Atmadja, Luh Putu Sendratari, 2019, Anak Putus sekolah e-Journal *Pendidikan Sosiologi* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan *Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan* (Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019)

KUISIONER PENELITIAN (KEPALA SEKOLAH)
STRATEGI PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH SMP FAKTOR
EKONOMI KELUARGA DI PROVINSI GORONTALO

IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin :
2. Agama :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :
5. Lama Bekerja :

DAFTAR PERTANYAAN

A. Mengidentifikasi masalah inti Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah SMP karena faktor ekonomi keluarga.

- 1) Apa masalah inti menyebabkan anak SMP putus sekolah di Provinsi Gorontalo?
Jawaban:
.....
Solusi yang dilakukan seperti apa?
Jawaban.....
.....
.....
.
- 2) Bagaimana kondisi sosial-ekonomi keluarga yang menjadi faktor dominan penyebab anak SMP putus sekolah?
Jawaban:
.....
- 3) Apakah biaya pendidikan (seragam, transportasi, buku, atau iuran lain) menjadi kendala utama bagi keluarga berpenghasilan rendah?
Jawaban:
.....
- 4) Bagaimana pengaruh pekerjaan orang tua (misalnya petani, buruh, nelayan) terhadap keberlanjutan pendidikan anak SMP?
Jawaban:

- 5) Apa bentuk strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi anak putus sekolah karena faktor ekonomi di Provinsi Gorontalo?

Jawaban:

.....
.....

Jenis bantuan yang diterima oleh bapak/ibu/anda dalam bentuk apa ?

Jawaban:

.....
.....

- 6) Bagaimana efektivitas program bantuan pendidikan (BOS, PIP, beasiswa daerah) dalam mengurangi angka putus sekolah?

Jawaban ;

.....
.....

- 7) Faktor apa saja yang menghambat implementasi strategi penanggulangan anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi?

Jawaban:

.....
.....

Menurut Bapak/Ibu/Anda ada alasan lainnya selain ekonomi keluarga?

Jawaban:

.....
.....

- 8) Bagaimana peran masyarakat, sekolah, dan LSM dalam mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bersekolah?

Jawaban:

.....
.....

- 9) Strategi apa yang paling relevan dan berkelanjutan untuk mencegah anak SMP putus sekolah di Gorontalo?

Jawaban:

.....
.....

B. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh bagi Anak Putus Sekolah SMP dan Strategi penanggulangannya di Gorontalo.

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka putus sekolah pada tingkat SMP di Gorontalo?

Jawaban:

.....
.....

Pengamatan Bapak/ibu/Anda Tindakan apay g telah di lakukan pemerintah daerah?

Jawaban ;
.....
.....

2. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga memengaruhi keputusan anak berhenti sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

3. Sejauh mana faktor sosial (misalnya budaya, lingkungan masyarakat, dukungan keluarga) berperan dalam mendorong anak putus sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

Apakah ada factor lain menurut bapak/ibu ?

Jawaban ;
.....
.....

4. Apakah faktor sekolah (fasilitas, kualitas guru, jarak sekolah, biaya transportasi) turut memengaruhi anak untuk putus sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

5. Bagaimana interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan dalam memperbesar risiko anak SMP putus sekolah di Provinsi Gorontalo?

Jawaban ;
.....
.....

B. Strategi Penanggulangan

6. Apa strategi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo?

Jawaban ;
.....
.....

7. Bagaimana efektivitas program bantuan pendidikan (misalnya BOS, Program Indonesia Pintar, beasiswa daerah) dalam mencegah anak putus sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

8. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam implementasi strategi penanggulangan anak putus sekolah?

9. Jawaban ;
.....
.....Bagaiman
a peran keluarga, masyarakat, dan lembaga swadaya dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak SMP?

Jawaban ;
.....
.....

10. Strategi apa yang paling tepat dan berkelanjutan untuk menekan angka anak putus sekolah di Provinsi Gorontalo?

Jawaban ;
.....
.....

C. Memformulasikan Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah SMP di Provinsi Gorontalo melalui Program Penanganan Melalui Penanganan Faktor Ekonomi Keluarga.?

- 1) Bagaimana kondisi pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran keluarga memengaruhi keputusan anak untuk berhenti sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

- 2) Apa hambatan utama keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak SMP?

Jawaban ;
.....
.....

- 3) Sejauh mana program pemerintah daerah efektif menjawab persoalan biaya pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga?

Jawaban ;
.....
.....

- 4) Apa peran sekolah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin?

Jawaban ;

.....
.....

- 5) Bagaimana strategi yang tepat untuk menanggulangi anak putus sekolah SMP melalui intervensi pada faktor ekonomi keluarga?

Jawaban ;

.....
.....

- 6) Bagaimana keterpaduan program pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat diformulasikan menjadi strategi terpadu penanggulangan anak putus sekolah?

Jawaban ;

.....
.....

- 7) Strategi apa yang paling relevan, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat di Gorontalo?

Jawaban ;

.....
.....

- 8) Bagaimana model kebijakan berbasis penanganan ekonomi keluarga dapat diformulasikan untuk menekan angka anak putus sekolah SMP?

Jawaban ;

.....
.....

D. Merumuskan Strategi Kebijakan Penanggulangan Anak Putus Sekolah SMP di Provinsi Gorontalo.?

1. Pemahaman Masalah

1. Bagaimana Bapak/Ibu memandang fenomena anak SMP putus sekolah di Provinsi Gorontalo?

Jawaban ;

.....
.....

2. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling dominan menyebabkan anak SMP berhenti sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

3. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan anak SMP?

Jawaban ;
.....
.....

2. Evaluasi Kebijakan & Program yang Ada

4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kebijakan dan program pemerintah (seperti BOS, PIP, atau beasiswa daerah) dalam menanggulangi anak putus sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

5. Kendala apa saja yang biasanya muncul dalam implementasi program penanggulangan anak putus sekolah di tingkat daerah maupun sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

6. Bagaimana peran sekolah, guru, dan masyarakat dalam membantu anak-anak yang berisiko putus sekolah?

Jawaban ;
.....
.....

3. Perumusan Strategi Kebijakan

7. Menurut Bapak/Ibu, strategi apa yang sebaiknya diformulasikan untuk menekan angka anak SMP putus sekolah di Provinsi Gorontalo?

Jawaban ;
.....
.....

8. Bagaimana kebijakan berbasis penanganan faktor ekonomi keluarga dapat lebih efektif dalam menjaga anak tetap bersekolah?

Jawaban ;
.....
.....

9. Sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat diperlukan dalam perumusan strategi ini?

Jawaban ;
.....
.....

10. Bagaimana model strategi kebijakan yang paling sesuai dengan konteks sosial-ekonomi Provinsi Gorontalo untuk mencegah anak putus sekolah SMP?

Jawaban ;

.....

.....